



UPAYA PENANGGULANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBERDAYAAN *KRAMA SUBAK* (Studi di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali)

Ni Putu Dyah Novi Lestari¹, Arwanto Harimas Ginting^{1,2}

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²corresponding author: aaarwanto@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how to overcome land conversion in Bali by empowering subak which is associated with the concept of Tri Hita Kirana. The development of the times and population growth increases the rate of conversion of agricultural land and threatens the existence of Subak in Bali. Using qualitative research methods, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. While data analysis through data reduction, data presentation, and verification. Observations show that the empowerment process for Krama Subak has been going well, but there are still obstacles that cause land conversions to continue, such as heterogeneous farmers' resources, farmers who are not the owners of their agricultural land, and farmers who are still tempted by rising land prices. Efforts have been made to overcome this problem by holding the Hita Lalu Program, increasing the intensification of subak management and the preparation of Regional Regulations on Sustainable Food Agricultural Land (LP2B).

Keywords: Empowerment, Agriculture, Krama Subak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penanggulangan alih fungsi lahan di Bali dengan memberdayakan subak yang dikaitkan dengan konsep Tri Hita Kirana. Perkembangan jaman dan penambahan penduduk menambah angka alih fungsi lahan pertanian dan mengancam keberadaan Subak di Bali. Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil pengamatan menunjukkan, proses pemberdayaan terhadap Krama Subak sudah berjalan baik namun masih saja ada hambatan yang menyebabkan alih fungsi lahan terus terjadi, seperti sumber daya petani yang masih heterogen, para petani bukan pemilik lahan pertaniannya, serta petani yang masih tergiur harga tanah yang terus meningkat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan diadakannya Program Hita Lalu, meningkatkan intensifikasi pengurus subak serta penyusunan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pertanian, Krama Subak

Copyright (c) 2021 Ni Putu Dyah Novi Lestari, Arwanto Harimas Ginting



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan semakin meningkat di tiap tahunnya. Sebagaimana dikatakan penulis kompas.com Ari Welianto bahwa Negara Indonesia adalah terpadat di antara negara berkembang di dunia. Kepadatan penduduk ini membuat terjadinya konversi lahan (Pakpahan, Anwar, & Besar, 1989) atau yang dikenal dengan istilah alih fungsi lahan. Di negara berkembang termasuk Indonesia, lahan pertanian merupakan lahan yang paling banyak digunakan untuk pembangunan. Kajian tentang alih fungsi lahan telah banyak dilakukan seperti dari perspektif pedesaan (Rustiadi, 2001), kajian alih fungsi lahan menjadi kawasan wisata dilakukan (Benu & Moniaga, 2016), ada juga alih fungsi menjadi kawasan agropolitan (Putra, 2015), menjadi lahan non pertanian (Ikhwanto, 2019).

Kajian Daulay, Putri, Barus, & Noorachmat, (2016) menunjukkan alih fungsi lahan justru dari adanya program pemerintah yakni Program Satu Juta Hektare Lahan Sawit, dimana alih fungsi ini memberikan perubahan sosial di masyarakat desa sebagai penerus generasi petani (Kusdiane, Soetarto, dan Sunito, 2016).

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika laju pertumbuhan penduduk, membuat lahan di sektor pertanian mulai terganggu karena banyaknya terjadi alih fungsi lahan. Provinsi Bali yang merupakan tujuan destinasi wisata ini pun tak luput dari permasalahan alih fungsi lahan.

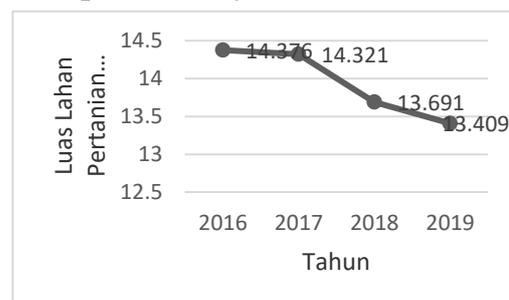
Pulau yang terkenal akan keindahan pariwisatanya hingga ke mancanegara tentunya membuat lahan produktif di Bali dimanfaatkan untuk pembangunan restoran, hotel, villa, dan destinasi wisata lainnya. Di sisi lain pertumbuhan penduduk di Bali dan arus urbanisasinya lebih dari 50 persen (Noverina, 2017), menyebabkan ikut meningkatnya

permintaan lahan guna pembangunan pemukiman.

Sektor pertanian di Bali sejak jaman dahulu telah mempunyai lembaga tradisional dalam mengatur sistem pengairan dan pengolahan irigasi persawahan yang disebut dengan Subak. Subak merupakan organisasi tradisional yang mendapat pengakuan dunia berupa status Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO yang tentunya menyebabkan keberadaan Subak di sektor pertanian di Bali memiliki eksistensi yang tinggi. Budiasa (2010) mengemukakan bahwa keberadaan Subak di Bali sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian sebab lahan pertanian mampu bertahan hingga saat ini karena adanya Subak, dan Subak tidak akan memiliki eksistensi jika tidak ada lahan pertanian. Dalam hal ini, lahan pertanian tentunya harus dijaga dari maraknya alih fungsi lahan agar keberadaan Subak sebagai tradisi di Bali tetap lestari.

Kabupaten Gianyar atau yang dijuluki dengan Kota Seni merupakan kabupaten dengan pusat seni dan budaya yang ada di Provinsi Bali dan termasuk sebagai salah satu kota utama (Rupini, Dewi, & Sueca, 2017). Berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Gianyar ini menyebabkan alih fungsi lahan di kabupaten ini meningkat drastis. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar luas lahan pertanian (sawah) mengalami penurunan dari tahun 2016-2018.

Figure 1. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Gianyar Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar

Kecamatan Sukawati merupakan kecamatan yang berada di perbatasan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar. Wilayah yang berada di perbatasan ini menyebabkan banyak terjadinya urbanisasi ke daerah ini sehingga alih fungsi lahan menjadi daerah pemukiman tak bisa dihindari. Alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Sukawati disebabkan karena pembangunan fisik yang semakin maju sehingga sektor pertanian mulai ditinggalkan generasi muda, juga dapat mengancam keberadaan Subak. Hal ini membuat banyak petani mengalami dilema dalam mengolah lahannya. Selain itu, harga tanah yang semakin meningkat juga membuat para petani tergiur untuk menjual lahan pertaniannya.

Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah sudah semestinya melaksanakan program atau kegiatan yang membuat kualitas *krama* Subak meningkat. Dengan adanya *krama* Subak dalam hal ini para petani yang memiliki kualitas yang baik tentunya mereka dapat mengolah lahan pertaniannya sehingga akan mempengaruhi hasil produksi pertanian dan meningkatnya pendapatan para petani. Meningkatnya kesejahteraan yang dialami oleh *krama* Subak tentunya dapat membuat para petani enggan untuk menjual atau mengalih fungsikan lahan mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan *krama* subak sangat penting dilakukan dalam menanggulangi alih fungsi lahan yang terjadi agar keberadaan subak di Bali tetap lestari.

KAJIAN TEORI

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepada individu dalam memberikan daya agar bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri. Pemberdayaan juga diartikan sebagai pemberian bantuan demi memenuhi kebutuhan baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Roesmidi

& Risyanti (2006) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperkuat kapasitas organisasi/ kelompok guna mencapai tujuan dan mengubah keadaan agar terjadi perubahan besar yang diperlukan dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan penting di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera tentunya memiliki daya lebih sehingga masyarakat tersebut menjadikan wilayahnya lebih maju dibandingkan dengan wilayah yang lain. Pada dasarnya, masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling berkaitan dan bergantung dengan yang lain sehingga tidak mampu untuk hidup sendiri. Dengan adanya kerjasama antar masyarakat tentunya akan mempermudah penyelesaian suatu masalah yang dihadapi. Mardikanto dan Soebiato (2015:61) menyebutkan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat baik kaum miskin sumber daya, kaum perempuan maupun kaum yang tidak berdaya diberi dukungan agar mampu meningkatkan kesejahteraannya sendiri.

Mardikanto (2013:28) menjelaskan mengenai lingkup dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

1. Bina Manusia

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu Bina Manusia. Hal yang didasari dari indikator ini adalah untuk mencapai kesejahteraan dan perbaikan mutu hidup masyarakat.

2. Bina Usaha

Dalam proses pemberdayaan, pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat tentunya harus sesuai dengan usaha yang dimiliki. Maka dari itu usaha tersebut perlu adanya pembinaan guna mengoptimalkan kinerja dari masyarakat. Seperti bagaimana tentang pemasaran

yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

3. Bina Lingkungan

Lingkungan memiliki peran penting terhadap masyarakat serta usahanya. Dalam indikator ini terdapat lingkungan fisik yang berkaitan dengan sumber daya alam serta lingkungan sosial yang merupakan keberlanjutan bisnis dan kehidupan sosial.

4. Bina Kelembagaan

Suatu lembaga dapat dikatakan berhasil jika memiliki efektivitas terhadap bina manusia, bina usaha serta bina lingkungan. Bina kelembagaan diartikan sebagai suatu perangkat yang diikuti oleh anggota suatu kelompok (masyarakat). Pada dasarnya, suatu bentuk jaringan sosial (*networking*) dapat dikatakan sebagai kelembagaan jika memiliki empat komponen yang dalam hal ini terdiri dari komponen *Krama Subak (person)*, komponen kepentingan/tujuan Subak, komponen *Awig-awig* (aturan) dan komponen struktur organisasi Subak.

Bali merupakan salah satu provinsi dengan ciri khas unik dalam melaksanakan kegiatan di bidang pertanian. Subak yang selama ini di kenal di Provinsi Bali pada dasarnya merupakan suatu wadah atau organisasi tradisional tempat untuk berhimpunnya para petani (*krama*) yang memiliki tujuan dan semangat yang tinggi dalam bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk bisa mengairi sawahnya dengan sistem irigasi tradisional ini yang bertujuan untuk memproduksi padi. Subak sebagai organisasi tidaklah sempurna dan eksistensinya terancam karena alih fungsi lahan menjadi non pertanian (Suyastiri, 2012). Pemberdayaan subak perlu dilakukan agar tercipta suatu kerukunan dalam suatu kehidupan organisasi tersebut. Subak sebagai sebuah organisasi memiliki aturan yang mengikat di dalam kegiatan persubakan yang disebut dengan *Awig-Awig*. *Awig-awig* atau yang disebut

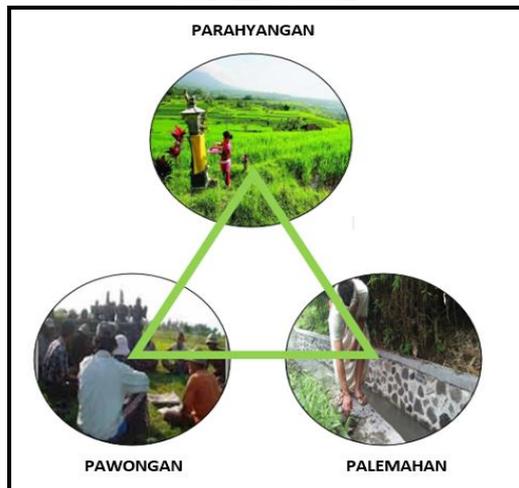
sebagai hukum adat di Bali ini merupakan aturan yang mengikat serta bersifat baku yang disusun oleh pengurus serta anggota subak dan telah disepakati bersama.

Struktur organisasi Subak beranggotakan para petani yang umumnya berasal dari satu wilayah desa yang sama yang biasa disebut dengan *Krama Subak*. Menurut Sutawan (2008:157), anggota subak dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu *Sekaa/krama yeh* (anggota aktif) yang artinya para petani yang mengikuti kegiatan subak secara aktif seperti pemeliharaan fasilitas subak maupun upacara keagamaan di Pura Subak. *Sekaa/keama pengampel* (anggota pasif) yang artinya anggota yang tidak diharuskan untuk ikut terlibat dalam kegiatan subak namun harus membayar sejumlah denda seperti beras atau uang. *Sekaa/krama leluputan* (anggota khusus/anggota kehormatan) yang artinya anggota yang tidak dibebani dengan kegiatan-kegiatan maupun kewajiban subak dikarenakan anggota tersebut memiliki jabatan tertentu di lingkungannya.

Alih fungsi lahan yang terjadi di Bali merupakan perubahan fungsi lahan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi yang ada sehingga mampu mengancam keberadaan Subak. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap *Krama Subak* agar para petani lebih sejahtera dan memiliki kemampuan dalam mengelola lahan pertaniannya sehingga mereka enggan untuk melakukan alih fungsi lahan. Dalam pemberdayaan ini dilakukan berdasarkan dengan konsep *Tri Hita Karana* (Windia dkk (2005), Wiana 2007, Wardana 2016). Konsep keseimbangan antara manusia, lingkungan dan pencipta-Nya sangat berkaitan erat dengan kelestarian Subak di Bali dikarenakan konsep ini merupakan pedoman hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. *Tri Hita Karana* secara etimologi memiliki arti yaitu Tri = tiga,

Hita = kebahagiaan/harmonis, Karana = penyebab/karena sehingga konsep ini merupakan tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan yang terjadi dikarenakan keseimbangan antara alam Tuhan (*Parhyangan*), alam manusia (*Pawongan*), dan alam lingkungan (*Palemahan*). Kegiatan pemberdayaan yang berdasarkan dengan konsep *Tri Hita Karana* tentunya memperhatikan setiap kegiatan pemberdayaan yang berhubungan dengan ketiga unsur dari konsep tersebut agar terciptanya keseimbangan antara manusia, lingkungan dan Sang Pencipta.

Figure 2. Konsep Tri Hita Karana dalam Subak



Sumber: Disadur dari *Google.com*

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan suatu fakta dan masalah yang terdapat di lapangan dalam sebuah penelitian atau dideskripsikan secara nyata berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu solusi dari permasalahan yang diteliti (Moleong, 2016). Dalam mengumpulkan data yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu dengan memerhatikan situasi sosial di lapangan; teknik wawancara yang mana informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball*

sampling; serta teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subak merupakan suatu lembaga mandiri beranggotakan para petani yang mengatur sistem pengairan irigasi air sawah dan keberadaannya masih diakui hingga saat ini. Kecamatan Sukawati memiliki Subak sebagai sebuah organisasi irigasi tradisional yang tangguh dan lestari. Berdasarkan Data dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukawati, jumlah Subak di Kecamatan Sukawati pada tahun 2020 mencapai 107 Subak yang tersebar di semua Desa yang ada di Kecamatan Sukawati.

Tabel 1 Subak Di Kecamatan Sukawati

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Subak (Kelompok)	Luas Lahan (Ha)
1	Kemenuh	13	327.95
2	Batuan Kaler	6	131.79
3	Batuan	8	162.23
4	Sukawati	13	369.00
5	Celuk	3	115.32
6	Guwang	12	211.74
7	Ketewel	13	312.25
8	Batubulan Kangan	6	180.71
9	Batubulan	13	203.31
10	Singapadu	7	172.29
11	Singapadu Tengah	6	142.53
12	Singapadu Kaler	7	149.42
Jumlah Keseluruhan		107	2478.54

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukawati

Sama halnya dengan permasalahan pertanian yang dihadapi di Provinsi Bali, Subak di Kecamatan Sukawati juga

menghadapi permasalahan yang sama, yaitu meningkatnya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk sehingga memerlukan pemukiman yang semakin luas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perumahan-perumahan (Darmanta, 2013) atau pemukiman yang semakin luas dibandingkan dengan lahan pertanian yang ada di Kecamatan Sukawati. Selain itu faktor pariwisata juga memengaruhi alih fungsi lahan pertanian ini, mulai dari dibangunnya Art Shop atau toko-toko kesenian di sepanjang jalan, hotel, villa, maupun restaurant.

Alih fungsi lahan pertanian ini semakin meningkat ditambah dengan para petani yang semakin tergiur akan harga tanah di Kecamatan Sukawati. Meningkatnya jumlah penduduk yang tentunya akan membutuhkan lahan untuk pemukiman menyebabkan harga tanah di Kecamatan Sukawati terus meningkat.

Berdasarkan data dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukawati tercatat Penurunan luas lahan pertanian dari tahun 2016 sampai 2020 sekitar 233,18 Ha atau rata-rata 2,24% setiap tahunnya. Dari tahun 2017 ke 2018 terjadi penurunan lahan sebesar 125,46 Ha, selanjutnya dari tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan lahan sebesar 29,23 Ha, dan pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan lahan sebesar 78,49 Ha.

Tabel 2 Grafik Penurunan Luas Lahan Pertanian Di Kecamatan Sukawati



Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukawati

1. Pemberdayaan *Krama Subak* dalam Menanggulangi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Sukawati

1.1 *Bina Manusia*

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal pertama yang harus diperhatikan adalah *Bina Manusia* yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas *Krama Subak*. Tujuan pemberdayaan ini tentunya agar terjadi perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan manusia dengan melakukan perbuatan yang menjadi upaya dalam mengembangkan kapasitas yang dimiliki manusia.

Pemerintah melaksanakan program pemberdayaan untuk *Krama Subak* guna meningkatkan kualitas *Krama Subak* itu sendiri, baik berupa sosialisasi, pembelajaran para petani maupun bantuan-bantuan yang diberikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Ir. I Made Raka mengatakan bahwa bantuan pupuk sudah diberikan kepada para *Krama Subak* tiap tahunnya dengan memberikan subsidi harga pupuk menjadi 180.000 per karung per 50 kg. Sedangkan untuk benih atau bibit unggul diberikan kepada subak yang memerlukan, dan diberikan secara merata di setiap tahunnya. Selain itu, pemberdayaan juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada *Krama Subak* untuk mengubah *mindset* bahwa pekerjaan petani merupakan pekerjaan yang mulia agar para petani merasa diperhatikan. Subak juga mendapatkan bantuan dari Dinas Kebudayaan berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar 50 juta untuk membantu keuangan Subak dalam mengadakan ritual keagamaan. Tidak kalah penting juga kegiatan pemberdayaan berupa sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan diberikan kepada *Krama Subak* guna meningkatkan kualitas para petani dalam mengolah lahan pertaniannya.

Pemberdayaan melalui *Bina Manusia* ini juga dilakukan berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan

nilai-nilai kehidupan yang dapat diterapkan di dalam Sistem Subak. Dalam hal ini nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang terjadi dapat dilihat yaitu bantuan-bantuan pupuk maupun bibit unggul guna meningkatkan kualitas pertanian yang merupakan penerapan dari unsur *Palemahan* atau hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitar, sosialisasi atau penyuluhan terhadap *Krama Subak* yang merupakan penerapan dari unsur *Pamongan* atau hubungan harmonis dengan sesama manusia, serta pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam pelaksanaan ritual-ritual keagamaan di Subak yang merupakan penerapan dari unsur *Parhyangan* atau hubungan harmonis manusia dengan Tuhan.

1.2 Bina Usaha

Selain kegiatan pemberdayaan manusia, kegiatan usaha tentunya tidak kalah penting dalam proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap *Krama Subak* agar mampu meningkatkan kesejahteraan para petani sehingga alih fungsi lahan yang terjadi akan semakin berkurang. Beberapa upaya yang dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat petani atau *Krama Subak* itu sendiri dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang semakin sulit untuk di hindari. Dalam meningkatkan usaha pertanian, baik dari pemerintah maupun *Krama Subak* pun melakukan berbagai upaya dari segi pengolahan tanah hingga hasil produksi. Beberapa bantuan diberikan untuk digunakan dalam mengolah lahan pertaniannya seperti traktor, alat penyiang gulma, mesin panen padi serta alat penyemprot pestisida. Selain itu Pemerintah terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana pertanian agar *Krama Subak* lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya sebagai petani. Sarana dan prasarana yang dibuat yaitu berupa perbaikan jalan atau akses menuju lahan sawah dan perbaikan sistem irigasi.

Beberapa juga dibangun *jogging track* atau objek wisata baru di sekitar areal pertanian/sawah yang tentunya mampu menekan terjadinya alih fungsi lahan karena areal pertanian/sawah yang terdapat *jogging track* atau objek wisata tersebut menjadi nilai *plus* yang patut dilestarikan.

Dilihat dari nilai-nilai *Tri Hita Karana*, pembangunan akses/jalan usaha tani dan perbaikan sistem irigasi juga merupakan penerapan dari nilai-nilai kehidupan tersebut. Unsur *Parhyangan* atau hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dapat diwujudkan dengan perbaikan sistem irigasi dimana air merupakan sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bernilai sehingga pengelolaan air irigasi dianggap penting dalam konsep harmoni dan kebersamaan. Unsur *Pawongan* atau hubungan harmonis antar sesama manusia diwujudkan dengan perbaikan air irigasi yang nantinya air irigasi tersebut saling mengalir antar *Krama Subak* secara adil dan merata. Selanjutnya unsur *Palemahan* atau hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitarnya diwujudkan dengan perbaikan akses/jalan usaha tani serta perbaikan air irigasi yang tentunya mampu menata lingkungan sawah agar menjadi lebih indah dan berfungsi dengan baik.

1.3 Bina Lingkungan

Lingkungan tentunya memiliki peran penting dalam kegiatan pemberdayaan. Lingkungan yang selama ini dimaknai adalah berupa lingkungan fisik yang berhubungan langsung dengan alam dan sumber dayanya, namun perlu disadari bahwa lingkungan sosial yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat juga sangat penting dalam proses pemberdayaan, terutama dalam lingkungan Subak.

Areal pertanian/sawah di setiap Subak di Kecamatan Sukawati merupakan suatu lingkungan fisik yang mana *Krama*

Subak bekerja dan saling berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam interaksi yang terjadi antar *Krama Subak* tentunya menyebabkan adanya hubungan sosial yang berarti adanya lingkungan sosial yang mempengaruhi aktivitas di areal *Subak* (lingkungan fisik) tersebut. pemerintah melalui pegawai PPL (Peyuluh Pertanian Lapangan) juga memerhatikan kondisi lingkungan fisik *Subak* agar tetap kondusif. Disamping itu, diadakannya rapat atau *sangkep* yang tentunya dapat membangun lingkungan sosial yang baik terhadap *Krama Subak*.

Penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam hal ini terjadi pada unsur *Palemahan* atau hubungan baik yang terbentuk diantara manusia dengan lingkungan sekitar yaitu kegiatan gotong royong untuk membersihkan saluran air irigasi serta monitoring terhadap keadaan lingkungan *Subak*. Unsur *Pawongan* atau hubungan harmonis antar sesama manusia dilihat dari gotong royong bersama-sama *Krama Subak* serta rapat atau *sangkep Krama Subak* yang mampu membangun lingkungan sosial dengan baik, serta unsur *Parhyangan* atau hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan terjadi pada proses gotong royong yang bertujuan untuk menjaga ciptaan Tuhan dengan membersihkan lingkungan *Subak* serta gotong royong membersihkan Pura *Subak*.

1.4 Bina Kelembagaan

Efektivitas suatu lembaga akan dipengaruhi oleh keberhasilan dari kegiatan kemanusiaan, usaha, dan lingkungan yang dapat berjalan dengan baik. *Subak* yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan tentunya menyebabkan *Subak* memiliki komponen-komponen kelembagaan yaitu komponen *person (Krama Subak)*, komponen kepentingan/ tujuan yang sesuai dengan tujuan *Subak* pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012, komponen aturan (*Awig-awig*) dan komponen struktur organisasi *Subak*.

Kegiatan kelembagaan *Subak* ini terlihat dari kerjasama dengan kelembagaan lain yang mampu mendukung kesejahteraan *Krama Subak* dalam mengolah lahan pertaniannya. Salah satunya adalah hasil produksi pertanian yang dijual dan dipasarkan melalui BUMDes. Hal ini dilakukan agar menghindari tengkulak atau makelar yang mungkin mengambil keuntungan berlebih sehingga dapat menyebabkan petani mendapat keuntungan yang kecil.

Pemberdayaan *Krama Subak* melalui keempat dimensi yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan tentunya dilakukan berdasarkan dengan konsep *Tri Hita Karana* sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Figure 3. Pemberdayaan dengan Konsep Tri Hita Karana



Pada hakekatnya, ajaran *Tri Hita Karana* ini mengajarkan untuk hidup bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai segala ciptaan-Nya baik sesama manusia maupun dengan lingkungan, agar tercipta hubungan yang harmonis dan keseimbangan alam ini dapat terjaga. Terkait dengan hal tersebut, setiap kegiatan yang dilakukan dari keempat dimensi pemberdayaan tersebut menyebabkan terjadinya hubungan yang keterkaitan antara manusia, lingkungan dan Tuhan YME sehingga hubungan yang harmonis dapat terjadi. Prinsip dari

pelaksanaan konsep ini harus seimbang antara manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*Palemahan*). Apabila keseimbangan ini telah dicapai, maka kehidupan yang harmonis akan terus terjadi dan terhindar dari adanya bencana.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat terhadap Pemberdayaan *Krama Subak* dalam Menanggulangi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Sukawati

Dalam kegiatan pemberdayaan *Krama Subak* dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung:

- 1) Program Kertha Masa yang dilakukan di beberapa Subak di Kecamatan Sukawati guna memanfaatkan lahan pertanian secara maksimal serta agar pembagian air irigasi dapat dilakukan secara adil.
- 2) Antusiasme *Krama Subak* terbilang cukup baik dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan terlebih lagi kesadaran *Krama Subak* akan pentingnya menjaga kelestarian Subak sebagai warisan budaya dunia agar alih fungsi lahan pertanian tidak semakin merajalela.

b. Faktor Penghambat

- 1) Sumber daya manusia heterogen yang terdiri dari petani maju, petani pemula dan petani penghambat. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia heterogen yaitu kemampuan *Krama Subak* dalam mengolah lahan pertaniannya yang berbeda-beda.

- 2) Petani bukan pemilik lahan sehingga sebagian besar petani di Kecamatan Sukawati merupakan petani penggarap. Hal ini menyebabkan para petani (*Krama Subak*) tidak memiliki wewenang dalam menjual lahan atau lahan yang akan dialihfungsikan karena lahan tersebut bukan milik mereka.
- 3) Petani tergiur harga tanah yang semakin lama terus meningkat. Terlebih lagi Kecamatan Sukawati merupakan daerah pariwisata sehingga banyak para petani beralih profesi ke sektor pariwisata dengan menjual lahan pertaniannya untuk digunakan sebagai modal usaha dan/atau sebagainya.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor Penghambat terhadap Pemberdayaan *Krama Subak* dalam Menanggulangi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Sukawati

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya agar pemberdayaan *Krama Subak* dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Program Hita Lalu (latihan dan kunjungan) yang merupakan program dari Balai Penyuluhan Pertanian berupa pelatihan, penyuluhan serta pendampingan secara berkala agar para petani bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengolah lahan pertaniannya dengan baik.
- b. Meningkatkan intensifikasi *Prajuru Subak* yang telah bertanggung jawab dengan Subak dan anggotanya sehingga mereka lebih bersemangat dalam bekerja dan pekerjaan sebagai petani merasa lebih dihargai oleh pemerintah.

- c. Pemerintah Daerah membuat peraturan yang berfungsi untuk melindungi lahan pertanian agar terhindari dari alih fungsi lahan yang terus meningkat dengan melakukan penyusunan Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Pemberdayaan *Krama Subak* dalam Menanggulangi Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Secara teoritis, dilihat dari sudut pandang penerapan Teori Totok Mardikanto, pemberdayaan *Krama Subak* dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian dilakukan berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut:
 - a. Bina Manusia
Dilakukan peningkatan kualitas dari *Krama Subak* seperti sosialisasi dan penyuluhan tentang pengolahan pertanian, bantuan subsidi pupuk, peralatan pengolahan lahan pertanian, bantuan pestisida, bantuan bibit unggul dan sebagainya guna mensejahterakan *Krama Subak* dan untuk melestarikan Subak sebagai warisan budaya agar terhindar dari kegiatan alih fungsi lahan pertanian.
 - b. Bina Usaha
Pemerintah maupun *Krama Subak* melakukan upaya dari segi pengolahan tanah hingga hasil produksi guna meningkatkan usaha pertanian. Pemerintah juga melakukan perbaikan sarana prasarana pertanian seperti perbaikan akses menuju lahan sawah dan perbaikan sistem irigasi agar *Krama Subak* bisa dengan

mudah pengolahan lahan pertaniannya.

- c. Bina Lingkungan
Selain lingkungan fisik, lingkungan sosial juga mempengaruhi proses pemberdayaan. Lingkungan fisik lahan pertanian dijaga dengan mengadakan gotong royong pembersihan lahan serta saluran irigasi. Dengan rutin dilakukannya kegiatan gotong royong bersama *Krama Subak*, maka dapat membangun lingkungan sosial yang efektif dan kondusif.
 - d. Bina Kelembagaan
Subak merupakan suatu organisasi tentunya memiliki komponen kelembagaan seperti komponen *person/Krama Subak*, komponen kepentingan/tujuan, komponen aturan (*Awig-awig*) serta komponen struktur subak. kegiatan kelembagaan Subak terlihat dari kerjasama dengan BUMDes dalam menjual hasil produksi pertanian.
2. Dari ke-4 (empat) bina tersebut, tentunya proses pemberdayaan *Krama Subak* dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian ini didasarkan pada konsep *Tri Hita Karana* yang artinya 3 (tiga) hubungan harmonis yang diciptakan dengan adanya keterkaitan antara alam Tuhan (*Parhyangan*), alam manusia (*Pawongan*), dan alam lingkungan (*Palemahan*). Melalui konsep ini, masyarakat mampu melakukan proses pemberdayaan ini dengan baik karena dilakukan berdasarkan pedoman hidup yang ada di Bali dan merupakan keyakinan dari masyarakat Bali itu sendiri khususnya di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.
 3. Faktor pendukung dalam pemberdayaan ini berupa Program Kertha Masa, serta antusiasme *Krama Subak* yang cukup baik. Adapun faktor penghambatnya

yaitu sumber daya petani yang heterogen, petani bukan pemilik lahan atau sebagai petani penggarap, serta petani yang tergiur harga tanah.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan Program Hita Lalu (Latihan dan Kunjungan), meningkatkan intensifikasi pengurus Subak, serta penyusunan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
5. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terhadap *Krama Subak* dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sudah berjalan secara optimal. Namun kegiatan ini belum mampu untuk menghentikan alih fungsi lahan yang terjadi, bahkan untuk menambah jumlah lahan pertanian. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta mensejahterakan *Krama Subak* sehingga mereka enggan untuk menjual lahan pertaniannya agar alih fungsi lahan dapat ditekan dan tidak semakin merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

- Benu, N. M., & Moniaga, V. R. (2016). Dampak ekonomi dan sosial alih fungsi lahan pertanian hortikultura menjadi kawasan wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 12(3), 113-124.
- Budiasa, I. W. (2010). Peran Ganda Subak Untuk Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Bali (The Double Roles of Subak For Sustainable Agriculture in Bali Province). *Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 9(2), 153-165.
- Daulay, A. R., Putri, E. I. K., Barus, B., & Noorachmat, B. P. (2016). Analisis faktor penyebab alih fungsi lahan sawah menjadi sawit di kabupaten tanjung jabung timur.
- Darmanta. 2013. "Peranan Subak Pulagan-Kumba dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Bali", *Artikel*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Ikhwanto, A. (2019). Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 60-73.
- Kusdiane, S. D., Soetarto, E., & Sunito, S. (2016). Alih fungsi lahan dan perubahan masyarakat di kecamatan cimanuk, kabupaten pandeglang. *Journal Of Agribusiness Management*.
- Mardikanto, Totok. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Mardikanto dan Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik Cetakan ke-3*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan ke-35*. Bandung: Rosdakarya
- Noverina, M. (2017). Fenomena Urbanisasi Dan Kebijakan Penyediaan Perumahan Dan Permukiman Di Perkotaan Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 103-124.
- Pakpahan, A., Anwar, A., & Besar, G. (1989). Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah.
- Putra, R. N. (2015). Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di kota batu sebagai kawasan agropolitan. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 71-80.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Subak*

- Rupini, A. A. D., Dewi, N. K. A., & Sueca, N. P. (2017). Implikasi alih fungsi lahan pertanian pada perkembangan spasial daerah pinggiran kota (studi kasus: Desa Batubulan, Gianyar). *Undagi: Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 5(2), 9-18.
- Rustiadi, E. (2001). Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. *Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan*, 10-11.
- Sutawan, Nyoman. 2008. *Organisasi dan Manajemen Subak di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Suyastiri. 2012. "Pemberdayaan Subak Melalui *Green Tourism* Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Pertanian di Bali", *Jurnal Ilmiah*. Vol. 8 No. 2, Yogyakarta: UPN Veteran
- Wiana, I. K. (2007). Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu. *Surabaya: Paramita*.
- Wardana, I Gusti Ngurah Wisnu. 2016. *Buku Panduan Tri Hita Karana Tourism Award & Accreditation 2016*. Denpasar: Yayasan Tri Hita Karana Bali
- Windia, W., Pusposutardjo, S., Sutawan, N., Sudira, P., & Arif, S. S. (2005). Transformasi sistem irigasi subak yang berlandaskan konsep TRI Hita Karana. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5(2), 43924.
- <https://www.nusabali.com/>. 2726 *Subak Berusaha Bertahan*. Selasa, 22 September 2020
- <https://bali.antaraneews.com/>. *Ubud Tertinggi Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Rabu, 23 September 2020
- <https://bulelengkab.go.id/>. *Struktur Organisasi Subak di Bali*. Kamis, 8 Oktober 2020
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/08/174500069/permasalahan-kependudukan-di-indonesia> Ari Welianto, Permasalahan Kependudukan di Indonesia. Rabu 17 November 2021
- https://www.google.com/search?q=tri+hit+a+karana+dalam+subak&client=ms-android-asus&prmd=imnxv&sxsrf=AOaemvIEHuE8cW9KZSchQVpaHxTRyIS7QA:1637153161480&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYwofltp_0AhXJ6XMBHU56BCMQ_AUoAXoECAIQAAQ&biw=360&bih=559&dpr=2#imgc=2JYccKvCkIz-qM